PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

UNIT KERJA : **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HENRY ISKANDAR MADYANTORO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **882250**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 2457 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 2581 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 517 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **163.000.000**

1. MOBIL, MPNP/MINIBUS AGYA 1,2 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N8LA A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H-F A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.930.368
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	1.697.930.368
III.	HUTANG	Rp.	80.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.617.930.368

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.